

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA  
PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL  
TERHADAP KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-  
2017)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Disusun Oleh :**

**WAHYU HANDAYANI SUTRISNO**

**B 200 160 268**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN,  
DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH  
(Studi empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun  
2015-2017)**

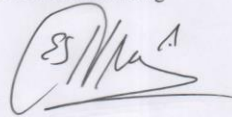
**NASKAH PUBLIKASI**

Oleh:

**WAHYU HANDAYANI SUTRISNO**  
B 200 160 268

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



**Drs. Eko Sugivanto, M. Si**  
NIDN: 538/0228055901

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN,  
DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH .  
(Studi empiris pada Kabupaten dan Kota Jawa Tengah Tahun 2015-2017)

NASKAH PUBLIKASI

Yang ditulis oleh:

**WAHYU HANDAYANI SUTRISNO**  
B 200 160 268

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Rabu, 12 Februari 2020  
Dan dinyatakan telah memenuhi isyarat

Dewan penguji:

1. Drs. Eko Sugiyanto, M. Si  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Drs. Wahyono, M.A., Akt  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Noer Sasongko, S.E., Akt., M.Si  
(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



**Dr. Iqbal Syamsudin, MM.**  
NIK. 19570217

#### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 12 Februari 2010

Penulis



**Wahyu Handayani Sutrisno**

**B200160268**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA  
PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL  
TERHADAP KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-  
2017)**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sampel dari penelitian ini adalah sebagian dari populasi yang akan diambil beberapa pemerintah kabupaten dan kota untuk dijadikan sampel sesuai dengan kriteria dari tahun 2015-2017. Metode sampel yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, yang diolah dengan menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 21.00 perangkat lunak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah, dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

**Abstract**

The purpose of this research is to find out the influence of regional original income, balance funds and capital expenditure on the financial performance of the regency and city government in Central Java Province. The population in this study were all regency and city governments in Central Java Province. The sample of this study is a portion of the population that will be taken by several district and city governments to be sampled according to criteria from 2015-2017. The sample method applied in this study is purposive sampling method. The analysis used in this study is multiple linear regression analysis, which was processed using the Statistical Package for Social Science (SPSS) version 21.00 software program. Based on the results of research conducted, it can be seen that local revenue has a positive effect on the financial performance of local governments, balancing funds negatively affect the financial performance of local governments, while capital expenditure has a positive effect on the financial performance of local governments.

**Keywords:** Local revenue, Balancing Funds, Capital Expenditures, Regional Government Financial Performance.

## **1. PENDAHULUAN**

Dengan berjalannya otonomi daerah selama dua dasawarsa merupakan implementasi dari UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah. Kedua undang-undang tersebut disempurnakan dengan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 kemudian diperbarui dan disempurnakan menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengatur pemerintahannya sendiri dengan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan secara jelas, transparan dan akuntabilitas, serta dapat menjalankan kinerja keuangan yang baik dan optimal agar suatu daerah tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Pasal 3 No. 12 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor penting dalam mencapai keberhasilan dan kesuksesan pembangunan serta dapat menyelenggarakan pemerintah daerah. Pemerintah daerah wajib memberikan laporan mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan untuk menjalankan roda pemerintahan daerahnya kepada masyarakat agar tercapainya asas transparansi sehingga dapat mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Kinerja Keuangan pemerintah daerah merupakan suatu hal terpenting dalam pemerintahan dan pihak eksternal. Kinerja keuangan dapat diukur dengan beberapa analisis rasio keuangan salah satunya yaitu rasio Derajat Desentralisasi Fiskal. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat melaksanakan dan mengoptimalkan

pengelolaan keuangan daerah supaya kinerja keuangan dapat semakin baik dan optimal. Namun pada kenyataannya, pengelolaan keuangan daerah tidak semua dapat berjalan dengan baik tergantung dalam melakukan dan melaksanakan pengelolaan keuangan suatu daerah tersebut.

Berdasarkan pelaksanaannya kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi beberapa komponen dalam pemerintahan. Komponen tersebut terdapat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang timbul melalui pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu pendapatan yang bersumber dari kekayaan daerah atau kegiatan ekonomi itu sendiri. Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdapat dana perimbangan yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai kontribusi besar terhadap struktur APBD. (Patrick, 2007) mengartikan dana perimbangan sebagai salah satu pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. Dana perimbangan diperlukan untuk upaya mengurangi ketimpangan baik vertikal maupun horizontal suatu pemerintah daerah. Dalam hal tersebut dana perimbangan akan membantu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi agar dapat mencapai sesuai yang diharapkan oleh suatu pemerintahan.

Selanjutnya, dalam suatu pemerintah daerah akan perlu pembiayaan keperluan dalam pemerintahannya sehingga pemerintah tersebut memerlukan belanja modal agar dapat mencapai kebutuhan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan (dua belas bulan). Belanja modal memiliki peran penting dalam untuk pemerintahan dalam membiayai dan memfasilitasi keperluan pemerintah guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakatnya.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini merujuk pada penelitian Sari dan Mustanda (2019) yang memiliki perbedaan tempat, periode waktu dan penambahan variabel yaitu dana perimbangan. Untuk itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:

**“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. (Studi empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017).**

## **2. METODE**

### **2.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan berupa Laporan Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017.

### **2.2 Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi merupakan suatu wilayah general yang terdiri atas obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono (2010). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017. Sampel dari penelitian ini adalah sebagian dari populasi yang akan diambil beberapa pemerintah kabupaten dan kota untuk dijadikan sampel sesuai dengan kriteria dari tahun 2015-2017.

### **2.3 Metode Pengambilan Sampel**

Metode sampel yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu (*purposive sampling*) adalah sebagai berikut:



Terdapat laporan neraca dari kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang tersedia tahun 2015-2017 dan Laporan keuangan pemerintah daerah berupa laporan realisasi anggaran pemerintah daerah.

Tersedianya data terkait variabel-variabel penelitian.

#### **2.4 Jenis dan Sumber Data**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi empiris. Studi empiris yaitu cara-cara yang digunakan dalam penelitian itu teramati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang akan digunakan (Sugiyono, 2017: 1). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data sekunder yang akan dipertimbangkan bahwa data ini memiliki validitas data yang dijamin oleh pihak lain sehingga optimal untuk digunakan dari laporan keuangan pemerintah daerah berupa laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dari [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) sesuai dengan permendagri.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017. Dalam penelitian ini akan meneliti 25 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan berupa Laporan Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017. Daftar kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Adapun proses penentuan sampel dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1

Proses Penentuan Sampel Penelitian

<b>Kriteria</b>	<b>Jumlah</b>
Laporan Keuangan pemerintah daerah berupa laporan realisasi anggaran	105

pemerintah daerah	
Jumlah data yang tidak sesuai kriteria	0
Jumlah sampel	105
Outlier	11
Jumlah sampel yang siap dianalisis	94

Sampel yang diperoleh sesuai dengan kriteria pengambilan sampel berjumlah 105 sampel. Akan tetapi, dari jumlah 105 sampel tersebut saat dilakukan analisis terdapat hasil uji heterodestisitas yang tidak berpengaruh signifikan. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dilakukan *outlier*, terdapat sebelas sampel yang dikurangi dalam proses pengolahan data. Dengan demikian peneliti memutuskan untuk mengurangi data penelitian dengan cara menghapus beberapa data. Sehingga total sampel yang dapat digunakan dalam proses pengolahan data adalah sebanyak 94 sampel.

### 3.1 Pembahasan dan Hasil Analisis

3.1.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dari data penelitian diatas menunjukkan, bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t (persial) yang menunjukkan nilai signifikansi (0,000) lebih kecil dari 0,05, ini berarti bahwa hipotesis 1 (H1) diterima.

Dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa, pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah berusaha menaikkan target penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai pembangunan daerah mereka. Hal ini terlihat pada data penelitian bahwa rata-rata penerimaan pendapatan asli daerah mereka meningkat dari tahun 2015, 2016 dan 2017. Meningkatnya PAD pemerintah daerah pada 3 tahun terakhir ini bisa menunjukkan semakin tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. PAD tersebut kemudian dialokasikan kepada pos-pos pembiayaan yang berimplikasi pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga tingkat kemandirian pemerintah daerah tinggi, tidak bergantung kepada bantuan eksternal (pemerintah pusat dan provinsi).

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Budianto dan Alexander (2016) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### 3.1.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Dari data penelitian diatas menunjukkan, bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t (persial) yang menunjukkan nilai signifikansi (0,000) lebih kecil dari 0,05, ini berarti bahwa hipotesis 2 (H2) ditolak. Dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa, penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat oleh Pemda tidak dapat meningkatkan kinerja keuangan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Jika realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadinya defisit. Oleh sebab itu untuk menutup kekurangan belanja daerah yang harus dilakukan adalah pemerintah pusat mentransfer dana dalam bentuk dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan akan masuk kedalam akun pendapatan daerah sehingga meningkatkan total penerimaan daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Sari (2016) menggunakan variabel dana perimbangan untuk menilai pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

### 3.1.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Kerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Dari data penelitian diatas menunjukkan, bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t (persial) yang menunjukkan nilai signifikansi (0,034) lebih kecil dari 0,05, ini berarti bahwa hipotesis 3 (H3) diterima. Dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa, pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah untuk pembangunan infrastruktur yang berupa pembangunan fasilitas umum yang signifikan dikatakan akan mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Jadi, jika suatu pelaksanaan belanja modal dilakukan dengan optimal maka akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah sehingga dapat

terlaksananya kesejahteraan masyarakat. Besaran Belanja Modal belum mampu memberikan peran yang penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Penggunaan anggaran Belanja Modal pada setiap pemerintah daerah yang tidak diarahkan pada semua kegiatan yang sifatnya investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang sudah dimaksimalkan dengan baik, sehingga hasil yang diberikan dari belanja modal ini sudah memberikan nilai yang positif terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Permata Sari dan Mustanda (2019) yang menyatakan bahwa hasil menunjukkan nilai positif yang berarti bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pengujian data berpengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda menunjukkan hasil, yaitu Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (KKPD) di Provinsi Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Kemudian Dana Perimbangan (DP) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (KKPD) di Provinsi Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sementara, Belanja Modal (BM) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (KKPD) di Provinsi Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,034 lebih kecil dari 0,05.

## **4.2 Keterbatasan**

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu dalam penelitian ini, hanya terbatas pada tiga variabel independen, diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel lain yang mengarah pada sektor publik. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian, menambah lokasi penelitian dan tahun penelitian.

## **4.3 Saran**

Untuk peneliti selanjutnya disarankan bahwa bagi pemerintah daerah, hendaknya mengelola dan mengalokasikan keuangan daerah yang lebih tepat sasaran dan efisien. Bagi pemerintah pusat, perlu mempertimbangkan tingkat kebutuhan pemerintah daerah serta senantiasa melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan dana perimbangan yang diberikan kepada daerah. Hal ini dilakukan agar dana perimbangan tepat sasaran dan berguna, sehingga pelaksanaan otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bagi penelitian selanjutnya dapat menambah periode penelitian lebih dari 3 tahun, sehingga bisa untuk generalisasi hasil penelitian yang berkaitan dengan pengukuran dengan periode yang singkat tersebut bisa dihindari oleh peneliti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andirfa *et al.* 2016. Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. ISSN: 2302-0164. 5(3). Hal: 30-38.
- Budianto & W Alexander, Stanly. 2016. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*. 4(4). hal. 844-851.
- Gustra, A. 2014. Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Ntuna (Tahun Anggaran 2009-2013). *Jurnal Ekonomi*. 1(2).

- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Selemba Empat.
- Heryanti, D. C., Wahidahwati & Suryono, B. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Analisa*. 3(1) : 98-116.
- Patrick, P. A. (2007). *The determinants of organizational innovativeness: The adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government*. Ph.D. dissertation, The Pennsylvania State University, United States-Pennsylvania. Retrieved August 8, 2011, from Accounting & Tax Periodicals. (Publication No. AAT3266180).
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02, Tentang Laporan Realisasi Anggaran.
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 13 Juni (2005). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (2005) Nomor 49. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Legalitas.
- Prakosa, Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Sari, I. P. 2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, *LEVERAGE*, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *JOM Pekon*. 3(1).
- Sari, P. D., & Mustada, K. 2019. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen*. 8(8). 2302-8912.
- Siagian, Sondang P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung :

Alfabeta.

Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung:

Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis :Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,*

*Kualitatif, Kombinasi dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-undang No. 18 tahun 2016 tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*

*Tahun Anggaran 2017*.

Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah antara*

*Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan*

*Daerah*.

Widjaja, HAW. 2009. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wiguna, K.A., dan Jati, K. 2019. Prngaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-

lain PAD yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*. 28.

2302-8556.